

SKRIPSI

**KEWAJIBAN PEMBERIAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) BERKAITAN DENGAN HAK OTONOMI PASIEN**



OLEH :

ERVINA DITA HARNIKA PUTRI

NIM 031811133020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWAJIBAN PEMBERIAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) BERKAITAN DENGAN HAK OTONOMI PASIEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Dr. ASTUTIK, S.H., M.H.

NIP. 196803031992032002

PENYUSUN



ERVINA DITA HARNIKA PUTRI

NIM. 031811133020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari

Senin, 17 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M
NIP. 198304252010122004



Anggota :

1. Dr. Astutik, S.H., M.H.
NIP. 196803031992032002



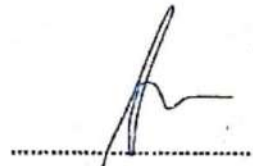
2. Dr. Maradona, S.H., LL.M
NIP. 1983041920006041001



3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP
NIP. 198104222006041002



4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M
NIP. 198104072005011001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Ervina Dita Harnika Putri
Nim : 031811133020
Bidang Minat : Peradilan
Judul : Kewajiban Pemberian Vaksin *Corona Virus Disease*
2019 (COVID-19) Berkaitan Dengan Hak Otonomi
Pasien

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak memiliki persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Januari 2022



Ervina Dita Harnika Putri

031811133020

MOTTO :

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan mereka sendiri

(AR-RAD:11)

Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dan di sisi-nya
terdapat ummul-kitab (Lauh Mahfuz)

(AR-RAD:39)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga. Selain daripada itu, penulis juga memiliki tujuan untuk menelaah dan mengkaji kewajiban pemberian vaksin *corona virus disease 2019* (COVID-19) berkaitan dengan hak otonomi pasien. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi atas bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H.,M.H.,LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Ibu Hanum Rahmانيar Helmi S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Astutik S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam Menyusun skripsi
4. Dosen Penguji yaitu Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M, Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,

MTCP., Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M yang telah memberikan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta para karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa membantu segala urusan penulis selama perkuliahan
6. Kedua orangtua penulis Alm. Suhartono dan Nanik Asmonah, serta saudara kandung penulis Apt. Devi Novitasari, S. Farm serta keluarga besar penulis.
7. Keluarga Besar SKI (Sentra Kerohanian Islam) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, FSB (Forum Studi Bisnis) Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Virda Wildan Syah selaku sahabat setia yang membantu dalam suka maupun duka dari 2018 hingga nanti.
9. Keluarga SC Dharmawangsa yaitu Virda, Noering, dan Nadilla selaku sahabat yang selalu mensupport selama perkuliahan.
10. Sahabat Penulis selama di perkuliahan yaitu Quinta, Dhanti, Noor Eva, Indah Apriani, Ani dan Gangga, Sabrina.
11. Kelompok 59 KKN-BBM 63: Isti, Mita, Elgi, Salsa, Hekmah, Fina, Sadida, Shindu, dan Erlin
12. Tim E INMOOT 2018: Daniel, Farhan, Ajeng, Bima, Haikal, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan Kelompok Ospek Justitia 2018
13. Serta kepada sahabat penulis yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Tya, Pipin, Richy, Dinda, Tria, dan Ahmad Rois Udin, S.T.

14. Serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Saya selaku penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis bersedia menerima kritik maupun saran dari pembaca berkaitan dengan kekurangan dan kelemahan yang tertuang di dalam materi skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi kelangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia.

Surabaya, Januari 2022

Penulis

ABSTRAK

Terjadinya wabah *Corona Virus Disease* 2019 atau COVID-19 pada akhir tahun 2019 menimbulkan berbagai dampak pada beberapa sektor kehidupan, sehingga banyak sektor kegiatan yang harus dilakukan dari rumah. Salah satu upaya yang saat ini dilakukan yaitu pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dengan tujuan untuk mengurangi penularan COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi merupakan wajib bagi setiap warga negara sebagaimana telah ditentukan sasaran penerima vaksin COVID-19 oleh pemerintah. Kewajiban tersebut diatur dalam beberapa peraturan, tetapi setiap orang memiliki hak otonomi untuk menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hak otonomi pasien berkaitan dengan pemberian vaksin COVID-19 dan akibat hukum atas penolakan vaksinasi COVID-19. Permasalahan dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan menggunakan metode penulisan *doctrinal research* dimana semua bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa hak otonomi yang dimiliki oleh setiap individu dapat dikesampingkan dikarenakan vaksinasi COVID-19 memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat banyak, serta tindakan penolakan vaksinasi COVID-19 dapat dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana apabila tidak disertai dengan alasan, akan tetapi jika terdapat alasan tertentu maka tindakan penolakan tersebut dapat dibenarkan.

Kata Kunci : hak otonomi pasien, kewajiban vaksinasi covid-19, akibat penolakan vaksinasi COVID-19

ABSTRACT

The outbreak of the *Corona Virus Disease 2019* or COVID-19 at the end of 2019 caused various impacts on several sectors of life, so many sectors of activity had to be carried out from home. One of the efforts currently being made is the implementation of the COVID-19 vaccination, with the aim of reducing the transmission of COVID-19. Vaccination is mandatory for every citizen as the government has determined the target recipient of the COVID-19 vaccine. This obligation is regulated in several regulations, but each person has the right of autonomy to determine health services for himself. This paper aims to examine and analyze patient autonomy rights related to the administration of the COVID-19 vaccine and the legal consequences of refusing to vaccinate against COVID-19. The problem is studied through a statute approach and a conceptual approach by using a doctrinal research writing method in which all legal materials are collected by means of a literature study. The results of this thesis indicate that the autonomy rights owned by each individual can be set aside because the COVID-19 vaccination has the aim of protecting the public at large, and the act of refusing the COVID-19 vaccination can be subject to administrative sanctions or criminal sanctions if not accompanied by reasons, but if there are certain reasons, the refusal can be justified.

Keywords: patient autonomy rights, obligation of COVID-19 vaccination, due to refusal of COVID-19 vaccination

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	10
1.5.2 Pendekatan (<i>Approach</i>).....	10
1.5.3 Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	14

1.6	Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....		17
HAK OTONOMI PASIEN BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN VAKSIN COVID-19.....		17
2.1	Hak Otonomi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan.....	17
2.1.1	Sumber Hukum Hak Otonomi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan	17
2.1.2	Pelayanan Kesehatan Menurut Sistem Kesehatan Nasional.....	27
2.2	Vaksinasi Sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19.....	32
2.2.1	Vaksinasi COVID-19 Berkaitan Dengan Keamanan Publik	38
2.2.2	Perbandingan Vaksinasi COVID-19 Di Beberapa Negara	44
BAB III.....		49
AKIBAT HUKUM PENOLAKAN VAKSINASI COVID-19		49
3.1	Pemberian Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi COVID-19.....	49
3.1.1	Sanksi Administrasi bagi Penolak Vaksinasi COVID-19	53
3.1.2	Sanksi Pidana bagi Penolak Vaksinasi COVID-19	57
3.1.3	Sanksi Sosial bagi Penolak Vaksinasi COVID-19	62
3.2	Alasan Penghapus Pidana bagi Penolak Vaksin COVID-19..	65
3.2.1	Bentuk-Bentuk Alasan Penghapus Pidana Menurut KUHP	65
3.2.2	Alasan-Alasan Seseorang Dapat Menolak Vaksinasi COVID-19	72
BAB IV		79

PENUTUPAN.....	79
4.1.1 Kesimpulan	79
4.1.2 Saran	80
DAFTAR BACAAN	81

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 3273)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus
Disease 2019* (COVID-19)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III Tahun 2008

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian
Sosial

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Surat Keputusan Gubernur DKI No. 987 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019*

Surat Edaran Nomor: HK.02.02/II/368/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Pada Kelompok Sasaran Lansia, Komorbid dan Penyintas COVID-19 Serta Sasaran Tunda

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (ICESCR)

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) atau Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Sosial

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Women Convention) atau Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak